

Giat Gereja Kristus Tuhan (GKT) Mewartakan Injil Di Dalam Enam Periode Sejarahnya Di Indonesia

Markus Dominggus

STT Aletheia, Lawang-Malang

Email : minggus02@yahoo.com

Recieved: 28 Oktober 2022 Revised: 11 November 2022 Published: 12 Desember 2022

Abstract

This article focuses on the efforts of the Church of Christ of God (GKT) in evangelizing in Indonesia, especially those of Chinese Christians, during the political situation at that time. In examining the faith proclamation activities of Chinese Christians, the author follows the line of thought of several observers of church history in Indonesia and Asia, who argue that faith proclamation activities are influenced by the role and operation of state power over the Church and Christians as well as cultural factors of the faith proclaimer and the society in which the faith is proclaimed. Therefore, this article will be presented by following five time periods of their life in Indonesia during this time, namely the Dutch Colonial Period (1900-1942), the Japanese Occupation Period (1942-1945), the Independence Revolution Period (1945-1949), the Old Order Period (1950-1965), the New Order Period (1966-1998) and the Post Reformation Period (1998-current). The study found that, despite the various measures taken, Chinese Christians in GKT have tried their best to mitigate the situation and under all circumstances strive to proclaim the gospel to the best of their ability. Whether the social and political situations created by various policies are good or bad for them, bringing losses or gains, Chinese Christians in GKT understand the gospel must still be preached.

Keywords: Church of Christ of God, Chinese christian, Gospel, proclamation of faith.

Abstrak

Artikel ini berfokus pada usaha-usaha Gereja Kristus Tuhan (GKT) dalam melakukan pengabaran Injil di Indonesia, terlebih yang telah dilakukan oleh orang-orang Tionghoa Kristen, di tengah situasi politik saat itu. Dalam meneropong kegiatan pewartaan iman orang-orang Tionghoa Kristen tersebut, penulis mengikuti jalan pikiran sejumlah pengamat sejarah gereja di Indonesia dan Asia, yang berpendapat bahwa kegiatan pewartaan iman dipengaruhi oleh peran dan operasi kekuasaan negara terhadap Gereja dan orang Kristen serta faktor-faktor kebudayaan dari pewarta iman dan masyarakat di mana iman itu diberitakan. Oleh karena itu, artikel ini akan disajikan dengan mengikuti lima periode waktu kehidupan mereka di Indonesia selama ini, yaitu Periode Kolonial Belanda (1900-1942), Periode Pendudukan Jepang (1942-1945), Periode Revolusi Kemerdekaan (1945-1949), Periode Orde Lama (1950-1965), Periode Orde Baru (1966-1998) dan Periode Pasca Reformasi (1998-kini). Studi ini menemukan bahwa, terlepas dari berbagai langkah yang diambilnya, orang-orang Tionghoa Kristen di GKT telah berusaha sebaik mungkin untuk memitigasi situasi dan dalam segala keadaan berjuang mewartakan Injil itu dengan sebaik-baiknya. Apakah situasi sosial dan politik yang diciptakan oleh berbagai kebijakan itu baik atau tidak baik baginya, mendatangkan kerugian atau keuntungan, orang-orang Tionghoa Kristen di GKT sadar betul bahwa Injil harus tetap diberitakan.

Kata kunci: Gereja Kristus Tuhan, orang Tionghoa, Injil, pewartaan iman.

1. Pendahuluan

Gereja Kristus Tuhan (GKT) adalah gereja yang lahir dan berkembang di antara pendatang dari Tiongkok, yang merantau ke Jawa Timur pada paruh kedua ke-19 sampai paruh pertama abad ke-20. Situasi dalam negeri Tiongkok yang tidak aman dan terus-menerus dilanda perang sejak meletusnya Perang Candu (1839-1842 dan 1856-1860), Pemberontakan Taiping (1850-1864), Pemberontakan Nian (1851-1858) dan kemudian Pemberontakan Boxer (1900) ditambah bencana banjir besar yang menelan korban ratusan ribu nyawa di tahun-tahun itu sampai awal tahun 1930-an, menimbulkan dorongan kuat untuk mencari kehidupan yang lebih baik di

tempat lain. Asia Tenggara menjadi area yang dipilih oleh kebanyakan orang untuk merantau. Hindia Belanda adalah salah satu tempat yang dituju karena situasi ekonomi yang baik dan membutuhkan banyak tenaga kerja.¹ Tiga pelabuhan besar, yaitu Xiamen di Provinsi Fujian, lalu Shantou (Swatou) dan Hongkong di Provinsi Guangdong menjadi tempat mereka berangkat.²

Di antara para pendatang ini, ada sejumlah orang yang sudah memeluk agama Kristen. Mereka berasal dari berbagai denominasi, seperti Presbyterian, Baptis, Methodist dan lainnya di Tiongkok. Namun sampai awal abad ke-20, belum ada satupun gereja yang tersedia untuk orang Tionghoa di Jawa Timur; padahal usaha pekabaran Injil kepada orang-orang Tionghoa sudah dimulai setidaknya sejak awal abad ke-19.³ Usaha itu tampaknya belum berhasil membuahkan sebuah gereja ataupun sebuah pelayanan khusus untuk orang-orang Tionghoa.

Keadaan tersebut tampaknya punya kaitan dengan beberapa kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah kolonial terhadap orang-orang Tionghoa. Yang pertama adalah memasukkan orang Tionghoa dalam kelompok *vreemde oosterlingen*, orang Timur asing. Orang Tionghoa dipandang dan diperlakukan sebagai *orang asing*. Selanjutnya adalah kebijakan pembatasan ruang domisili (*wijkenstelsel*) dan mobilitas (*passenstelsel*). Seluruh kebijakan yang bersifat *apartheid* ini memisahkan orang-orang Tionghoa dari orang yang berbeda darinya.⁴ Bagi yang beragama Kristen, kebijakan itu menyulitkan kontak dan persekutuan dengan saudarasaudari seimannya yang non-Tionghoa.

¹ Lihat G. William Skinner, "Golongan Minoritas Tionghoa," dalam *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia*, Mely G. Tan, ed. (Jakarta: Leknas LIPI & Yayasan Obor Indonesia, 1979), 1-29.

² Lihat Kaoru Sugihara, "Patterns of Chinese Emigration to Southeast Asia, 1869–1939" dalam *Japan, China, and the Growth of the Asian International Economy, 1850–1949* Volume 1, edited by Kaoru Sugihara (New York: Oxford University Press, 2005), 244-274. Untuk banjir besar di Tiongkok pada abad ke-19 lihat Yu Ye, Xiuqi Fang & Fan Li, "Response and recovery measures for two floods in north China during the nineteenth century: a comparative study", Springerplus. 2016; 5 (1): 1985. doi: 10.1186/s40064-016-3642-y

³ Pekerjaan itu dilakukan oleh dua orang misionaris dari badan misi London Missionary Society (LMS) di Inggris, yaitu Walter Henry Medhurst (1796-1857) dan Jacob Tomlin (1793-1880). Lihat Walter Henry Medhurst, *Journal of a tour along the coast of Java and Bali &c., with, A short account of the island of Bali particularly of Bali Baliling* (Singapura: The Mission Press, 1830); juga J. Tomlin, *Missionary Journals and Letters Written During Eleven Years Residence and Travels Among Chinese, Siamese, Javanese, Khassias, and Other Eastern Nations* (London: John Nisbet and Co. Berners Street, 1840).

⁴ Lihat Ong Hok Ham, *Anti Cina, Kapitalisme Cina dan Gerakan Cina: Sejarah Etnis Cina di Indonesia* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), bab 1-2.

Keterpisahan ini juga disumbang oleh faktor budaya. Persekutuan dengan sesama yang seiman di gereja non-Tionghoa sulit terjadi karena perbedaan bahasa, tradisi budaya termasuk tradisi kegerejaan. Dengan sesama orang Tionghoa yang sudah lama berasimilasi dalam masyarakat dan kebudayaan setempat pun – yaitu orang Tionghoa peranakan – para pendatang baru dari Tiongkok ini mengalami kesulitan untuk membaaur lantaran jarak budaya yang ada di antara keduanya. Situasi ini menempatkan mereka untuk berpaling ke dalam grupnya masing-masing, membangun jemaat di sana serta memberitakan Injil kepada orang-orang yang seasal, sebudaya dan sebahasa dengan mereka.

Dalam meneropong kegiatan pewartaan iman orang-orang Tionghoa Kristen yang berkumpul di dalam Gereja Kristus Tuhan (GKT), saya mengikuti jalan pikiran sejumlah pengamat sejarah gereja di Indonesia dan Asia, yang berpendapat bahwa kegiatan pewartaan iman dipengaruhi oleh peran dan operasi kekuasaan negara terhadap Gereja dan orang Kristen serta faktor-faktor kebudayaan dari pewarta iman dan masyarakat di mana iman itu diberitakan.⁵

Penyajianannya akan mengikuti lima periode waktu kehidupan mereka di Indonesia selama ini, yaitu Periode Kolonial Belanda (1900-1942), Periode Pendudukan Jepang (1942-1945), Periode Revolusi Kemerdekaan (1945-1949), Periode Orde Lama (1950-1965), Periode Orde Baru (1966-1998) dan Periode Pasca Reformasi (1998-kini).

2. Pembahasan

2.1 Periode Kolonial Belanda (1900-1942)

Pada masa ini, generasi awal orang-orang Tionghoa Kristen dari Tiongkok berhadapan dengan sejumlah kebijakan kolonial Belanda, yang mengurung mereka secara spasial dalam *pecinan-pecinan* dan memisahkan mereka secara sosial, politik, budaya dan keagamaan dari orang-orang non-Tionghoa.

⁵ Lihat, misalnya, Julius Bautista & Francis Khek Gee Lim, eds., *Christianity and the State in Asia*:

Complicity and conflict (New York, NY.: Routledge, 2009); Susanne Schroter, ed. *Christianity in Indonesia*:

Perspective of Power (Munster: Lit Verlag, 2010); Peter C. Phan, ed. *Christianities in Asia* (Malden: WileyBlackwell, 2011); Edmund Kee-Fook Chia, *Asian Christianity and Theology: Inculturation, Interreligious Dialogue, Integral Liberation* (New York: Routledge, 2022).

Dalam dirinya sendiri mereka pun terpisah-pisah dalam berbagai grup menurut latar belakang dialek bahasa dan daerah asal masing-masing. Di antara kelompok-kelompok itu adalah kelompok orang-orang Kanton, orang-orang Fuzhou, orang-orang Hinghwa, orang-orang Hokkian atau Amoy, orang-orang Hakka dan lain-lain. Tiap-tiap kelompok memiliki profesi dan bidang usaha masing-masing, dengan gildanya (*guilds*) sendiri-sendiri.

Dalam *pecinan* para pendatang Kristen dari Tiongkok itu memulai persekutuan-persekutuan doa di dalam kelompok masing-masing. Tidak ada catatan resmi yang dapat ditemukan sampai berapa lama hal itu berlangsung. Namun dapat dikatakan sudah cukup lama. Pada bulan Juni 1909, Gereja Methodis Episkopal Konferensi Malaysia membuka pos pekabaran

Injil di antara orang-orang Tionghoa yang berbahasa Hokkian kawasan *pecinan* Surabaya. Kelompok ini berlatr belakang gereja *Presbyterian*.⁶ Dua atau tiga tahun kemudian, orang-orang berbahasa Kanton dengan sukarela menggabungkan dirinya ke dalam pos pelayanan Gereja Methodis ini. Langkah mereka juga diikuti di kemudian hari oleh kelompok berbahasa Fuzhou, Hinghwa dan bahasa-bahasa lainnya. Untuk tiap-tiap kelompok, Gereja Methodist menempatkan seorang pelayan firman yang memakai dialek yang sama. Mereka semua melayani di bawah supervisi seorang misionaris Methodist yang ditempatkan di situ.

Tidak saja di Surabaya, orang-orang Tionghoa yang ada di kota-kota lain di Jawa Timur. Dua tempat di mana Gereja Methodist berhasil mendirikan sebuah pos pelayanan ialah Tulung Agung dan Malang.⁷

Metode pekabaran Injil yang dipakai bermacam-macam. Di antaranya adalah lewat penjualan Alkitab berbahasa Tionghoa, kebaktian khusus untuk penginjilan (semacam Kebaktian Kebangunan Rohani), pemutaran film dan pekabaran Injil pribadi melalui kunjungan dari rumah ke rumah. Penginjilan lewat sekolah dilakukan dalam kerja sama dengan asosiasi orang-orang Tionghoa, *Tiong Hoa Hwee Koan* (THHK), yang mendirikan sekolah-sekolah khusus untuk orang-orang Tionghoa di banyak kota di Jawa. Misionaris Methodist masuk ke sekolah, menawarkan jasa mengajar bahasa Inggris dan bidang studi lain.

Pendekatan lain yang coba dilakukan dalam memberitakan Injil bersifat “budaya tandingan” (*counter cultural*). Hal ini diungkapkan secara terang

⁶ Richard M. Daulay, *Kekristenan dan Kesukubangsaan: Sejarah Perjumpaan Methodisme dengan*

Orang Batak dan Orang Tionghoa di Indonesia 1905-1995 (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 1996), 125.

⁷ *Minutes of the Seventh Session of the Netherlands Indies Mission Conference of the Methodist Episkopal Church*, held in Buitenzorg, Java, January 22nd to 25th, 1925: 21-22.

benderang dalam proposal pembangunan gedung gereja di *pecinan* Surabaya. Di antara fasilitas yang akan disediakan di gedung berlantar tiga itu ialah sebuah *social hall*, yang akan dipergunakan untuk menyediakan hiburan berupa “game of all kinds, also moving pictures.”⁸ Sejumlah ruangan di lantai tiga akan dipergunakan untuk kos-kosan bagi anak-anak muda Tionghoa. Seluruh fasilitas ini sengaja dibangun untuk mencegah banyak pendatang muda dari Tiongkok ini jatuh dalam perjudian, pelacuran dan bermabuk-mabukan bila mereka diam di “Chinese hotels” di kawasan *pecinan*. Gereja berusaha menyediakan hiburan yang sehat bagi masyarakat.

Depresi ekonomi yang melanda dunia pada akhir tahun 20-an, menyebabkan Gereja Methodist menarik dirinya dari Jawa Timur, dan bahkan dari seluruh Jawa pada tahun 1928. Sebelum meninggalkannya, penanganan jemaat diserahkan kepada badan misi Belanda yang bekerja di Jawa Timur. Namun karena tidak ada tenaga khusus yang mampu berbahasa Tionghoa maka sampai beberapa tahun kemudian jemaat-jemaat Tionghoa di Surabaya, Malang dan Tulung Agung terus berjalan dengan sumber daya mereka sendiri.

Pada tahun 1931, datang seorang pelayan khusus berkebangsaan Belanda, yang bernama Ds H.A.C. Hildering. Ia mampu berbahasa Hokkian. Ia ditugaskan oleh badan misi Belanda yang bekerja di Jawa Timur untuk mendampingi jemaat-jemaat Tionghoa. Ia dibantu oleh seorang Tionghoa peranakan bernama Oei Soei Tiong. Semasa pelayanan keduanya, jemaat orang

Tionghoa peranakan berhasil dikembangkan dan diorganisir dalam satu wadah persekutuan.

Seiring dengan semangat zending di era 30-an yang mendorong pendewasaan gereja-gereja di Hindia Belanda, Ds Hildering tercatat memiliki peran besar dalam menyatukan dua kelompok orang Tionghoa Kristen – *totok* dan *peranakan* – dalam satu gereja yang sama. Gereja itu diresmikan eksistensinya oleh Gubernur Jenderal Belanda pada bulan Desember 1939 dengan nama *Tiong Hoa Kie Tok Kauw Hwee Classis Oost-Java* (THKTKH Classis Oost-Java) atau *Tiong Hoa Kie Tok Kauw Hwee Klasis Jawa Timur* (THKTKH Klasis Jatim).

Pertumbuhan jemaat-jemaat Tionghoa mendapat dorongan kuat dari kunjungan Pdt. Dr. John Sung, seorang pengkhotbah kebangunan rohani dari Tiongkok.⁹ Tercatat dua kali ia datang ke Surabaya untuk mengadakan kebaktian penginjilan di tahun 1939 atas sponsor empat jemaat Tionghoa yang berbahasa Hokkien, Kanton, Fuzhou-Kuoyu dan Hinghwa. Kontribusi

⁸ Harry C. Bower, *Soerabaja Church Project*, surat bertanggal 11 Juli 1925.

⁹ Chris Hartono, *Orang Tionghoa dan Pekabaran Injil* (Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 1996), 77-81

penting John Sung ialah pada membakar semangat pekabaran Injil di antara orang Tionghoa, mendorong orang Tionghoa untuk melakukan pewartaan Injil kepada sesama orang Tionghoa dan memberikan pelatihan mengenai cara memberitakan Injil. Yang lain, lewat busana tradisional Tiongkok yang dikenakannya dan sejumlah penjelasannya, ia meyakinkan orang-orang Tionghoa bahwa menjadi Kristen tidak akan membuat mereka berhenti menjadi orang Tionghoa dan berubah menjadi orang Barat. Ketionghoan dan Kekristenan bukan sesuatu yang harus dipertentangkan.

2.2 Periode Pendudukan Jepang (1942-1945)

Catatan sejarah lokal yang ditulis di dalam jemaat-jemaat GKT menyebut periode ini sebagai periode “kegelapan.” Pada masa ini, hampir tidak ada catatan sama sekali tentang kehidupan gereja Tionghoa. Sebagaimana terjadi di tempat lain, para perintis GKT di Jawa Timur turut pula mengalami kesulitan oleh tindakan dan kebijakan pemerintah pendudukan Jepang.

Invasi Jepang ke Tiongkok pada tahun 1937 menimbulkan antipati mendalam di antara orang Tionghoa di luar Tiongkok terhadap Jepang. Rasa antipati itu kuat sekali dirasakan oleh orang-orang Tionghoa totok di Hindia Belanda, yang memiliki ikatan nasional dan kultural sangat kuat dengan negeri asalnya. Dalam berbagai cara mereka mendukung gerakan perlawanan yang berlangsung di negerinya. Aktivitas ini rupanya diam-diam diketahui pula oleh intel-intel Jepang yang beroperasi di Hindia Belanda. Setelah Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942, mereka mencari, menangkap dan memenjarakan tokoh-tokoh orang Tionghoa yang menentanginya. Sisanya, dicurigai, diawasi dan dalam banyak kesempatan mendapat perlakuan yang buruk. Dalam catatan jemaat-jemaat lokal GKT, dicatat tentang pindahnya sejumlah orang dari kota Surabaya ke kota-kota kecil di sudut-sudut Jawa Timur demi menghindari operasi kekuasaan Jepang.

Kebijakan lain yang diterapkan pemerintah Jepang dan berpengaruh besar pada masa depan THKTKH Classis Oost-Java ialah merangkul orang-orang Tionghoa totok untuk menjadi mitra ekonomi dan *meresinifikasi* orang-orang Tionghoa peranakan.

Kerja sama dengan Jepang membuat orang Tionghoa dipandang buruk oleh sebagian masyarakat non-Tionghoa sehingga ketika Jepang kalah dan meninggalkan Indonesia, kekosongan kekuasaan dimanfaatkan untuk merusak properti orang Tionghoa.

Kebijakan resinifikasi yang berisi kewajiban bagi orang-orang Tionghoa peranakan dididik di sekolah-sekolah Tionghoa. Di sekolah-sekolah ini mereka harus belajar membaca, menulis dan berbicara dalam bahasa Tionghoa. Mereka diharuskan menyebut dan menulis namanya

dengan aksara Tionghoa. Persoalan ini menambah bahan bakar baru kepada problem relasi yang sebelumnya sudah ada di antara keduanya.¹⁰

Persoalan ini menciptakan jarak yang makin besar di antara dua komunitas Tionghoa ini. Dan dalam satu dan lain cara yang tidak terlihat, tentu turut berkontribusi dalam pemisahan kedua komunitas ini dalam gereja THKTKH Jatim di kemudian hari.

Selain dua kebijakan itu, melanjutkan kebijakan yang sudah ditempuh Belanda, status kewarganegaraan orang Tionghoa tetap sebagai orang asing. Karenanya, tiap orang Tionghoa harus membayar pajak bangsa asing, yang besarnya berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Selain itu, mereka juga harus memiliki kartu tanda pengenal sebagai orang asing, yang harus dibawa kemana saja bila bepergian. Sejumlah uang harus dibayarkan untuk mendapatkan kartu itu dan tiap orang yang gagal membawanya akan menerima sanksi hukuman yang berat.¹⁰ Kebijakan ini tentu menghambat mobilitas manusia dan usaha-usaha pekabaran Injil, baik di dalam komunitas yang sebudaya maupun, apalagi, yang lintas budaya.

Karena itu di masa ini, tidak ada catatan tentang aktivitas pekabaran Injil. Jemaat-jemaat di Surabaya, Malang dan di kota-kota lain berjalan tersendat-sendat. Gedung gereja THKTKH Klasik Jatim di Malang (dekat Pasar Comboran) bahkan untuk sesaat tidak bisa dipergunakan karena area sekitar dipergunakan Jepang untuk gudang amunisi. Jemaat harus pindah ke rumah pribadi anggota jemaat dan beribadah di sana selama beberapa masa.

2.3 Periode Revolusi Kemerdekaan (1945-1949)

Pecahnya revolusi kemerdekaan membawa kesulitan tersendiri dalam usaha perawatan jemaat dan pewartaan iman di antara orang-orang Tionghoa. Perang yang terjadi di antara pihak Republik dan Belanda di mana-mana menciptakan situasi hidup yang sukar bagi semua orang.

Strategi bumi hangus yang ditempuh militer Indonesia untuk merespons Aksi Polisional I Belanda di tahun 1947, disalahpahami oleh sebagian laskar rakyat dengan melakukan aksiaksi perusakan, pembakaran dan penjarahan.¹¹ Orang-orang Tionghoa Kristen di THKTKH Klasik Jatim turut merasakan akibat dari tindakan-tindakan ini.¹² Sebuah kunjungan pastoral yang dilakukan oleh pengurus THKTKH Klasik Jatim pada

¹⁰ Kwartanada dalam *Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa*, 31.

¹¹ Lihat Benny G. Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik: Mengungkap Fakta Sejarah Tersembunyi Orang Tionghoa di Indonesia* (Jakarta: TransMedia, 2008), 613. Juga Tjamboek Berdoeri, *Indonesia Dalam Api dan Bara* (Jakarta: ELKASA, 2004), 313-337, yang memberikan laporan saksi mata dari peristiwa pembumihangusan Malang.

¹² "Koo Twan Tjhing dalam Kenangan" dalam *Iman Yang B'ri Menang*, 26.

pertengahan tahun 1948 melaporkan sejumlah kerusakan dan kerugian yang dialami jemaat-jemaat karena peristiwa itu.¹³ Dalam satu dan lain cara, peristiwa-peristiwa ini menimbulkan luka yang merintangai terciptanya relasi yang utuh dengan orang yang berbeda etnis dan kebangsaan.

¹⁰ Untuk masalah relasi itu, lihat Twang Peck Yang, *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950* (Yogyakarta: Penerbit Niagara, 2005).

Di dalam periode yang sama, muncul kebijakan baru yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan “Masalah Cina.” Pada tahun 1946, lahir undang-undang pertama yang mengatur status kewarganegaraan orang Tionghoa. Untuk menjadi WNI, orang-orang Tionghoa diminta menghadap pengadilan terdekat dan mengikuti prosedur yang sudah ditentukan. Mereka diberi batas waktu sampai tahun 1947. Pecahnya *Clash I* dengan Belanda membuat situasi keamanan terganggu sehingga tidak memungkinkan bagi orang Tionghoa yang selama ini berstatus asing mengurus kewarganegaraannya. Tidak lama setelah perang reda, muncul lagi *Clash II* di tahun 1948. Setelah kesepakatan damai Konferensi Meja Bundar (KMB) diterima tahun 1949, orang-orang Tionghoa diberi kesempatan lagi selama dua tahun sampai 1951, untuk memilih kewarganegaraannya. Namun masuknya pengaruh Tiongkok pada tahun 1950 membuat sebagian besar orang Tionghoa *totok* memilih untuk tidak menjadi WNI dan tetap menjadi WNA.¹⁴

Dengan pilihan itu, dapat dikatakan, hampir semua orang Tionghoa *totok* Kristen yang ada di THKTKH Klasis Jatim memilih menjadi WNA. Arah pelayanan gereja dan target pewartaan Injil terus difokuskan kepada orang-orang Tionghoa *totok*.

2.4 Periode Orde Lama (1950-1965)

Tantangan yang timbul dari kebijakan negara yang muncul pada periode ini adalah penggunaan bahasa Indonesia untuk tulisan-tulisan beraksara Tionghoa. Kebijakan ini diambil sebagai buntut dari dugaan keterlibatan Taiwan dalam peristiwa PRRI/Permesta. Semua sekolah asing Tionghoa yang berkiblat ke Taiwan ditutup dan tulisan-tulisan berbahasa Tionghoa di ruang publik diharuskan memberikan terjemahan Indonesia.

¹³ Lihat “Rapport Visitatoren jang ringkas” dalam *Madjallah Persekoetoean Tiong Hoa Kie Tok Kauw Hwee Indonesia*, Tahun Ke 1, No. 7-9, Jan-Maart 1949: 4-7.

¹⁴ Lihat lebih jauh David Mozingo, *Chinese Policy Toward Indonesia 1949-1967* (Jakarta: Equinox Publishing, 2007).

Pada periode inilah nama THKTKH Klasis Jatim mulai diberi terjemahan *Gereja Kristen Tionghoa* (GKT) dan dikenalkan ke publik dengan nama itu.

Tantangan lain adalah kebijakan ekonomi pemerintah yang mengistimewakan orang *pribumi* daripada orang Tionghoa. Seluruh bisnis orang Tionghoa terlarang untuk dilakukan di desadesa, dan hanya bisa dilakukan sampai tingkat kecamatan. Selain itu, gagalnya penerapan utuh perjanjian dwi-kewarganegaraan di antara Indonesia dan Tiongkok menjadi tantangan lain pada kehidupan dan pelayanan THKTKH Klasis Jatim di mana sebagian di antara warga jemaat harus dipulangkan kembali ke Tiongkok.

Seluruh kebijakan ini menempatkan orang Tionghoa sebagai komponen sosial yang berbeda dari orang-orang Indonesia. Keasingan mereka dipertegas, dan membuat mereka makin berjarak dengan kelompok masyarakat lainnya. Lokasi kediaman yang masih didominasi di area *pecinan* makin mengukuhkan keterpisahan ini. Karena itu, tugas pewartaan iman makin terkurung dalam komunitasnya masing-masing.

Strategi pewartaan yang ditempuh ialah memanfaatkan jaringan kesukuan, kesamaan profesi dan bahasa. Pekabar Injil dari suku dan bahasa tertentu akan menemui orang-orang yang sebahasa dan sesuku dengannya. Mereka yang sesuku, sebahasa dan seprofesi saling berkontak. Iman Kristen diceritakan dan disaksikan seiring dengan makin akrabnya relasi satu sama lain. Dalam periode ini bermunculan jemaat-jemaat Tionghoa Kristen yang baru di beberapa kota di Jawa Timur, seperti Kediri, Probolinggo, Malang dan Lumajang.

Strategi lain ialah bekerja sama dengan sekolah teologi untuk mendidik calon-calon penginjil dan pendeta.¹⁵ Metode lain disebut *serie meeting*, yaitu kebaktian kebangunan rohani selama beberapa hari di sebuah jemaat; *youth camp*, *women camp* dan *children camp*. Dalam acara-acara ini selalu ada kebaktian kebangunan rohani yang menantang peserta untuk percaya pada Tuhan Yesus. Kunjungan dari rumah ke rumah, baik untuk melayani orang sakit, orang susah maupun untuk memberitakan Injil terus dilakukan. Metode penginjilan yang diajarkan John Sung masih terus dipraktikkan.

Karakteristik lain yang mewarnai upaya pekabaran Injil di masa ini ialah keterlibatan aktif kaum awam. Sejumlah *penatua* dari beberapa jemaat, turut berkhutbah keliling dari satu kota ke kota lain, memberitakan Injil dari jemaat yang satu ke jemaat yang lain.

¹⁵ Sekolah teologi dimaksud adalah *Madrasah Alkitab Asia Tenggara* (MAAT), yang kini bernama STT SAAT.

2.5 Periode Orde Baru (1966-1998)

Dalam periode ini, orang-orang Tionghoa di Indonesia mengalami operasi kekuasaan negara yang sangat intens. Berbeda dari kebijakan yang pernah diambil dalam periode-periode sebelumnya, yang ujungnya malah mengeraskan “keasingan” orang Tionghoa, pemerintahan Orde Baru mengambil sejumlah langkah baru yang bermaksud menghapus karakteristik asing itu.

Dimulai dari penutupan seluruh sekolah-sekolah asing Tionghoa yang berkilat ke Tiongkok pada Mei 1966 dan pengambilalihan aset-asetnya, lalu berlanjut dengan instruksi penggunaan istilah *Tjina/Cina* sebagai ganti istilah *Tionghoa* dalam seluruh administrasi publik dan militer dan penggantian nama keluarga dan pribadi serta berbagai kebijakan lain yang malah mendiskriminasi dan terasa menindas. Seluruh kebijakan ini dikenal dengan nama *asimilasi*.

Peristiwa 1965 yang dituduh didalangi Partai Komunis Indonesia (PKI) dan dugaan keterlibatan Tiongkok di dalamnya berujung kepada putusnya hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Hal ini makin memperburuk kualitas atmosfer sosial, politik dan budaya di Indonesia bagi orang-orang Tionghoa.

Dalam periode ini, orang-orang Tionghoa Kristen di THKTKH Klasik Jatim memutuskan mengambil langkah drastis. Dalam sidang tahun terakhirnya di Surabaya pada tahun 1968, para pemimpin THKTKH Klasik Jatim sepakat mengubah nama gerejanya, dari Gereja Kristen Tionghoa menjadi *Gereja Kristus Tuhan*. Bentuk gereja yang dahulu federasi, kini berubah menjadi sinodal. Para pemimpin gereja yang dahulu berkewarganegaraan asing kini beramai-ramai mengurus status kewarganegaraan baru, warga negara Indonesia. Dari fokus hanya kepada orang Tionghoa saja, kini pelayanan, penanaman gereja dan sasaran pekabaran Injil diarahkan kepada semua suku di Indonesia.

Dalam periode ini gereja-gereja baru ditanam di antara orang Jawa di Jawa dan pendatang dari Nusa Tenggara Timur di pulau Sumbawa didirikan. Jemaat-jemaat yang dahulu anggotanya melulu hanya orang Tionghoa saja kini mulai menerima kehadiran orang-orang non-Tionghoa. Para pekerja gerejawi – pengabar Injil dan pendeta – yang dahulu melulu orang Tionghoa kini diwarnai oleh orang-orang non-Tionghoa.

Intrusi lebih jauh ke dalam masyarakat non-Tionghoa dilakukan lewat dua lembaga pendidikan yang didirikannya berturut-turut di tahun 1969 dan 1970. Lembaga yang pertama

adalah Sekolah Tinggi Teologi Aletheia (STTA) di Lawang; sementara yang kedua ialah Sekolah Kristen Aletheia (SKA). SKA yang pertama berdiri di

kota Surabaya (1970), selanjutnya di kota Lumajang (1972), Jember (1973), Genteng-Banyuwangi (1973), lalu Ampenan (1975), Malang (1983) dan kota-kota lainnya.

Sejak angkatan pertama, STTA sudah menerima orang-orang dari suku non-Tionghoa untuk belajar bahkan mengajar di sana. Dan prosentasenya terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Hal serupa juga terjadi dengan SKA. Pada awalnya, jumlah siswanya didominasi oleh anak-anak Tionghoa asing yang tidak bisa bersekolah lagi sejak sekolahsekolah mereka ditutup pada tahun 1966. Di antara siswanya yang pertama adalah anak-anak warga jemaat sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu, keragamannya semakin meningkat dengan bergabungnya anak-anak non-Tionghoa ke sekolah.

Dua lembaga pendidikan ini telah berjasa membantu orang-orang Tionghoa Kristen di GKT melakukan tugas pewartaan iman secara lintas budaya. Injil yang selama ini diberitakan di antara orang-orang Tionghoa saja, kini diluaskan pemberitaannya kepada orang-orang nonTionghoa.

Peran SKA jadi menonjol di sini. Di antara tugas yang diemban oleh para pekerja gerejawi di jemaat yang memiliki sebuah SKA di dekatnya ialah menjadi guru Pendidikan Agama Kristen (PAK), sekaligus gembala sekolah. Posisi itu menempatkan mereka dalam interaksi intens baik dengan siswa maupun dengan keluarga siswa. Lewat mata pelajaran PAK dan program-program pembinaan rohani di sekolah, anak-anak diperkenalkan dengan iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus.

Menyadari bahwa latar belakang budaya ketionghoaannya membatasi dirinya secara kultural untuk melayani orang-orang non-Tionghoa, GKT kemudian berusaha menaruh pekerjapekerja gerejawi yang dari segi budaya tidak terhambat untuk melayani jemaat-jemaat nonTionghoa.

Dengan semakin banyaknya tenaga-tenaga pekerja gerejawi tersedia untuk melayani jemaatjemaat dan semakin formalnya tatanan organisasi gereja maka peran awam yang begitu besar di periode-periode sebelumnya mulai menyusut. Kalau dahulu pernah ada dan bekerja para pengkhotbah awam, di periode ini dan selanjutnya praktis tidak ada lagi. Hal itu sudah tidak dimungkinkan lagi oleh tata gereja baru yang dibuat di tahun 1968. Hal serupa juga terjadi dengan aktivitas awam dalam memberitakan Injil. Dibanding dengan periode-periode sebelumnya di mana munculnya jemaat-jemaat di berbagai kota akibat kegiatan orang-orang awam melakukan penginjilan pribadi dari rumah ke rumah kerabat dan sahabatnya, dalam periode ini kegiatan ini makin meredup. Tugas itu diserahkan lebih banyak kepada pekerja gerejawi profesional, yaitu pejabat Pengabar Injil (Evangelist) dan Pendeta di dalam jemaat.

Strategi lain yang ditempuh untuk mengembangkan jemaat dan mendorong kegiatan pekabaran Injil ialah lewat pengembangan jemaat baru di area kota di mana diam sejumlah besar anggota gereja dari sebuah jemaat.

Pada periode ini, aktivitas pekabaran Injil diperluas maknanya tidak semata memberitakan kabar atau berita iman secara verbal tetapi juga secara aktual dalam perbuatan melalui bantuan-bantuan kemanusiaan juga pelayanan sosial di bidang kesehatan.

2.6 Periode Pasca Reformasi 1998 (1998—Kini)

Perubahan lansekap sosial-politik negara sejak tahun 1998 diikuti pula dengan perubahan sikap negara terhadap orang-orang Tionghoa. Sejumlah pengamat sepakat bahwa arah yang ditempuh oleh pemerintah ialah multikulturalisme, yang menekankan penerimaan dan pengakuan keanekaragaman budaya di dalam masyarakat.¹⁷ Segala peraturan dan kebijakan yang pernah diambil oleh pemerintahan sebelumnya terhadap orang Tionghoa kini dicabut, dihentikan dan dibatalkan.

Banyak orang Tionghoa di Indonesia menyambut arah baru ini dengan antusias. Di manamana bermunculan usaha-usaha “meresinifikasi” orang-orang Tionghoa, yang dipandang telah rusak, bahkan hilang, ciri sosial dan budayanya sebagai orang Tionghoa akibat operasi kekuasaan pemerintahan Orde Baru.¹⁸ Perayaan festival-festival budaya Tionghoa, secara khusus Tahun Baru Imlek, dan belajar bahasa Mandarin berkembang di manamana.¹⁹ Yang lain adalah menjamurnya publikasi koran dan majalah berbahasa Mandarin.²⁰ Ada semacam “demam budaya Tionghoa” yang melanda sebagian kalangan orang Tionghoa.

Demam tersebut juga melanda GKT. Dorongan untuk menggunakan bahasa Mandarin disampaikan di berbagai kesempatan. Para pekerja gerejawi didorong untuk belajar bahasa itu demi kepentingan pelayanan di antara orang Tionghoa. Di berbagai jemaat muncul semacam tren melakukan ibadah khusus bernuansa Imlek, yang dipersiapkan sebagai medium khusus mengabarkan Injil kepada orang-orang Tionghoa. Ceramah-ceramah khusus dan topik-topik khotbah khusus yang menyentuh relasi iman Kristen dan budaya Tionghoa bermunculan bak cendawan di musim hujan. Dalam periode ini, muncul minat yang kuat untuk kembali memfokuskan usaha-usaha pekabaran Injil dan penjangkauan anggota baru kepada orang-orang Tionghoa. Akar-akar ketionghoannya yang seperti terlupakan selama tiga puluh tahun era Orde Baru kini kembali dimunculkan dan dirayakan.

Minat untuk berjejaring dengan sesama orang Tionghoa Kristen yang serupa karakteristik kultural dan gerejawinya juga berkembang. Kegiatan-kegiatan yang disponsori oleh sebuah lembaga pelayanan Tionghoa Kristen Injili di Jakarta tidak pernah sepi dari peserta yang berasal dari anggota

GKT. Ketika lembaga ini berubah status kelembagaannya dari yayasan menjadi badan hukum gereja di tahun 2007, GKT menjadi salah satu dari sedikit sinode gereja yang memberikan rekomendasi.²¹ Meski demikian, belajar dari pengalaman hidup yang sulit di masa-masa sebelumnya, para pemimpin GKT mencoba berhati-hati menyikapi

¹⁷ Lihat Leo Suryadinata, “Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnik Tionghoa: Dari Asimilasi ke Multikulturalisme?” *ANTROPOLOGI INDONESIA* 71, 2003: 1-12; juga Wasino, et all, “FROM ASSIMILATION TO PLURALISM AND MULTICULTURALISM POLICY: STATE POLICY TOWARDS ETHNIC CHINESE IN INDONESIA,” *Paramita: Historical Studies Journal*, 29(2) 2019: 213-223. DOI:

<http://dx.doi.org/10.15294/10.15294/paramita.v29i1.20869>

¹⁸ Lihat Charlotte Setijadi, “Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia: Changing Identity Politics and the Paradox of Sinification,” *ISEAS Perspective*, Issue: 2016, No.12: 1-10; Chang Yau Hoon, “How to be Chinese: Ethnic Chinese Experience a 'Reawakening' of their Chinese Identity”, *Inside Indonesia*, 78 (2004): 13-14. https://ink.library.smu.edu.sg/soas_research/834

¹⁹ Jessalin Tanjung, “Identity crisis: the confusion of being Chinese Indonesian” (20/3/2020) dalam <https://www.diggitmagazine.com/articles/chinese-indonesian>.

²⁰ Chang Yau Hoon, “A Hundred Flowers Bloom: The Re-emergence of the Chinese Press in PostSuharto Indonesia” in *Media and the Chinese Diaspora: Community, Communications and Commerce*, edited by Sun Wanning (London: Routledge, 2006), 91-118. DOI: <https://doi.org/10.4324/9780203873601>

²¹ Lihat Surat Rekomendasi Badan Pengurus Sinode GKT No. 015/BPS/GKT/XXIII/05-09, 29 Juni 2007.

kehadiran lembaga ini. Sampai beberapa tahun sesudahnya, GKT memilih tidak menjadi anggotanya karena dalam nama lembaga ada istilah *Tionghoa*, yang sampai saat itu masih terlarang dipakai secara resmi. Perubahan sikap terjadi setelah pada tahun 2014 pemerintah membatalkan peraturan yang pelarangan istilah “Tionghoa”, yang pernah dikeluarkan rezim Orde Baru di tahun 1966. Setelah itu, barulah GKT memilih menjadi anggota lembaga tersebut.

Menanggapi seluruh perkembangan ini, para pemimpin GKT coba bersikap realistis. Menguatnya sikap untuk menegaskan ketionghoan GKT disadari perlu diimbangi dengan kondisi riil GKT saat ini yang plural. Sambil menegaskan latar belakangnya yang lahir dan tumbuh di dalam komunitas orang Tionghoa, para pemimpin GKT juga menggarisbawahi realitas dirinya yang sudah berkembang sejak 1968 sebagai gereja yang tidak saja terbuka namun juga melayani dan menjangkau orang-orang dari berbagai suku dan budaya di Indonesia.

Di tengah situasi Indonesia yang berubah cepat sejak 1998, sampai hari ini GKT masih terus melakukan penyesuaian-penyesuaian agar pewartaan Injil dapat terus dilakukan. Suatu perubahan signifikan adalah orientasi pemahamannya terhadap pekabaran Injil. Meneguhkan perubahan yang sudah dimulai di periode sebelumnya, setelah 1998, GKT menegaskan bahwa Injil harus diberitakan bukan semata dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan perbuatan kasih yang nyata. Hal ini ditampilkan dalam perubahan nama dan tugas

Departemen Pekabaran Injil Sinode GKT menjadi *Departemen Misi*. Dalam pernyataan tugas Departemen Misi diuraikan bahwa pekerjaan misi yang dilakukan GKT ada dua, yaitu misi pekabaran Injil secara verbal lewat kata dan penanaman gereja, dan misi sosial lewat bantuan-bantuan kemanusiaan di daerah bencana serta pembangunan sarana-sarana kebutuhan masyarakat.

3. Simpulan

Tulisan ini berupaya menyajikan usaha-usaha GKT mengabarkan Injil. Mengikuti garis pemikiran teoretis tentang pengaruh kekuasaan negara atau penguasa di suatu negara terhadap gerak pekabaran Injil, tulisan menggarisbawahinya dengan menunjukkan apa yang terjadi dan diperbuat oleh orang-orang Tionghoa Kristen di GKT, dalam sejarahnya yang panjang di Indonesia. Terlepas dari berbagai langkah yang diambilnya, orang-orang Tionghoa Kristen di GKT telah berusaha sebaik mungkin untuk memitigasi situasi dan dalam segala keadaan berjuang mewartakan Injil itu dengan sebaik-baiknya. Apakah situasi sosial dan politik yang diciptakan oleh berbagai kebijakan itu baik atau tidak baik baginya, mendatangkan kerugian atau keuntungan, orang-orang Tionghoa Kristen di GKT sadar betul bahwa Injil harus tetap diberitakan.